

Provinsi Kalimantan Barat

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi SDA Lahan dan Pertanian

Berdasarkan arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dari total luas daerah Kalimantan Barat seluas 14.680.700 ha, terbagi untuk luas Kawasan Budidaya adalah seluas 1.717.002 ha (72,93%) dan Kawasan lindung seluas 3.963.698 ha (27,07%). Kabupaten Ketapang mempunyai Kawasan Lindung terluas sebesar 2.743.339 ha, diikuti oleh Kabupaten Sintang (1.614.743 ha), Kapuas Hulu 1.282.592 ha, dan Sanggau (1.190.671 ha). Kabupaten Kapuas Hulu memiliki rasio Kawasan Lindung terhadap Kawasan Budidaya tertinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Barat (2,33%).

Tabel Arahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat : Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Budidaya					Total Luas Daerah	Rasio
		HPT	HPB	HPK	PLK	Jumlah		
01	Kab Sambas	0	132.894	0	442.605	575.499	639.570	1,11
02	Kab Bengkayang	20.691	54.248	0	380.567	455.506	539.630	1,18
03	Kab Landak	12.106	146.495	0	715.167	874.168	990.910	1,13
04	Kab Pontianak	77.186	172.393	21.197	409.901	680.677	826.210	1,21
05	Kab Sanggau	82.952	3.622.625	19.353	725.741	1.190.671	1.285.780	1,08
06	Kab Ketapang	670.329	662.431	163.261	1.247.318	2.743.339	3.580.900	1,31
07	Kab Sintang	652.510	101.905	0	860.328	1.614.743	2.163.820	1,34
08	Kab Kapuas Hulu	459.528	155.778	99.248	568.038	1.282.592	2.984.200	2,33
09	Kab Sekadau	22.571	72.897	0	391.748	487.216	544.420	1,12
10	Kab Melawi	300.469	156.022	0	299.330	755.821	1.064.080	1,41
71	Kota Pontianak	0	0	0	10.780	10.780	10.780	1,00
72	Kota Singkawang	0	0	0	45.990	45.990	50.400	1,10
	Jumlah	2.298.342	2.017.688	303.059	6.097.913	10.717.002	14.680.700	1,37

Sumber : RTRW Prov Kalbar 2004 (catatan Kab Kubu Raya bergabung dengan Kab Pontianak dan Kab Kayong Utara bergabung dengan Kab Ketapang). HPT = Hutan Produksi Terbatas, HPB = Hutan Produksi Biasa, HPK = Hutan Produksi Konversi.

Berdasarkan arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dari total luas daerah Kalimantan Barat seluas 14.680.700 ha, terbagi untuk luas Kawasan Budidaya adalah seluas 1.717.002 ha (72,93%) dan Kawasan lindung seluas 3.963.698 ha (27,07%). Kabupaten Ketapang mempunyai Kawasan Lindung terluas sebesar 2.743.339 ha, diikuti oleh Kabupaten Sintang (1.614.743 ha), Kapuas Hulu 1.282.592 ha, dan Sanggau (1.190.671 ha). Kabupaten Kapuas Hulu memiliki rasio Kawasan Lindung terhadap Kawasan Budidaya tertinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Barat (2,33%).

Tabel Arahannya Pemanfaatan lahan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat : Kawasan Lindung Provinsi Kalimantan Barat (Ha)

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Lindung							Jumlah
		TN	CA	TWA	HL	HLG	HLB	SAL	
01	Kab Sambas	0	6.678	21.836	24,37	0	10.053	1.134	64.071
02	Kab Bengkayang	44.834	709	0	38.581	0	0	0	84.124
03	Kab Landak	53.648	2.876	0	58.189	2.029	0	0	116.742
04	Kab Pontianak	0	0	0	8.707	72.183	64.643	0	145.533
05	Kab Sanggau	811	0	0	94.298	0	0	0	95.109
06	Kab Ketapang	104.617	146.114	0	332.388	61.953	1.496	190.993	837.561
07	Kab Sintang	70.642	0	1.982	476.453	0	0	0	549.077
08	Kab Kapuas Hulu	890.489	0	0	806.539	4,58	0	0	1.701.608
09	Kab Sekadau	0	0	0	57.204	0	0	0	57.204
10	Kab Melawi	41.135	0	0	267.124	0	0	0	308.259
71	Kota Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kota Singkawang	0	4.410	0	0	0	0	0	4410
	Jumlah	1.206.176	160.787	23.818	2.163.853	140.745	76.192	192.127	3.963.698

Sumber : RTRW Prov Kalbar 2004 (catatan Kab Kubu Raya bergabung dengan Kab Pontianak dan Kab Kayong Utara bergabung dengan Kab Ketapang). TN = Hutan Taman Nasional, CA = Hutan Cagar Alam, TWA = Hutan Wisata Alam, HL= Hutan Lindung

Potensi Produksi Sektor Pertanian

Sektor Pertanian secara umum masih menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian Kalimantan Barat karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 23,08 persen dari total PDRB pada tahun 2013. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor ini dibutuhkan pelaksanaan teknologi pertanian yang utuh terutama penyediaan benih/bibit unggul bermutu.

Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Subsektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi oleh produksi padi. Perubahan musim dan cuaca serta bertambahnya luas panen menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya produksi padi di tahun 2013, yaitu dari 1.300.798 ton di tahun 2009 meningkat menjadi 1.441.876 ton di tahun 2013, dengan rata-rata produksi selama kurun waktu tersebut sebesar 1.351.930 ton dan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,77 per tahun. Sentra padi di Kalimantan Barat terutama adalah Kabupaten Sambas yang memberi kontribusi sekitar 22,20 persen terhadap produksi padi di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten lain yang memberi daya dukung produksi padi cukup besar terutama Kubu Raya sekitar 15,11 persen dan Kabupaten Landak sekitar 15,44 persen. Ketiga kabupaten ini menghasilkan sekitar setengah dari produksi padi di Kalimantan Barat.

Tabel Produksi Padi dan Jagung di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013

Keterangan Tahun	Padi			Jagung		
	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (ton)	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2009	418.929	31,05	1.300.798	41.302	40,39	166.833
2010	428.461	31,37	1.343.888	45.014	37,38	168.273
2011	444.353	30,90	1.372.989	45.593	35,27	160.826
2012	427.798	30,39	1.300.100	44.642	38,11	170.124
2013	464.898	31,01	1.441.876	42.621	37,53	159.973
Rata-Rata Produksi/th	436.888	30,94	1.351.930	43.834	37,74	165.206
Pertumbuhan (%/th)	2,73	(0,02)	2,77	0,92	(1,64)	(0,94)

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), diolah

Selain padi, komoditas jagung merupakan salah satu unggulan tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2009 luas panen jagung adalah seluas 41.302 ha dengan produksi sebesar 166.833 ton dan pada tahun 2013 luas panen meningkat menjadi 42.621 ha, namun produksinya menurun menjadi 159.973 ton dengan rata-rata produksi sebesar 165.206 ton per tahun dan rata-rata pertumbuhan produksi yang cenderung menurun sebesar 0,94 persen. Produksi jagung terbesar berada di Kabupaten Bengkayang yang mencapai 77,27 persen dari total produksi jagung Kalimantan Barat, yaitu sebesar 123.613 ton pada tahun 2013.

Produksi ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2013 masing-masing sebesar 168.521 ton dan 15.296 ton, meningkat 9,74 persen dan 0,83 persen dibandingkan tahun 2012. Sementara, kacang kedelai dan kacang hijau produksi terbesar dari Kabupaten Sambas yang mencapai 81,22 persen dan 87,34 persen dari total produksi Kalimantan Barat sebesar masing-masing 1.677 ton dan 553 ton.

Subsektor Tanaman Hortikultura

Secara umum subsektor hortikultura di Kalimantan Barat memproduksi berbagai jenis sayuran seperti tomat, buncis, cabe, kangkung, bayam, peterseli, ketimun, terung, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 2009-2013 beberapa jenis sayuran menunjukkan pertumbuhan yang negatif (penurunan produksi) seperti tomat, buncis, ketimun dan bayam, namun beberapa jenis sayuran lain seperti peterseli, cabe, dan kangkung menunjukkan peningkatan produksi.

Tabel Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013

Tahun/Keterangan	Tomat	Buncis	Cabe	Kangkung	Bayam	Petsay	Ketimun
2009	3.440	2.528	7.205	5.460	3.048	7.518	12.102
2010	2.958	1.358	4.371	5.677	2.485	5.378	9.732
2011	2.876	1.537	9.455	6.679	2.954	12.230	9.186
2012	2.289	1.465	7.575	6.053	2.871	11.193	8.647
2013	2.208	1.624	8.486	7.657	3.069	11.967	9.743
Rata-rata produksi/th	2.754	1.702	7.415	6.305	2.885	9.657	9.882
Pertumbuhan (%/th)	-3,20	-4,42	11,29	4,22	-0,30	15,62	-3,39

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2014), diolah

Produksi buah-buahan di Provinsi Kalimantan Barat cukup tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun beberapa komoditas buah-buahan tertentu produksinya terpusat di beberapa kabupaten.kota, seperti jeruk di Kabupaten Sambas (74,41%), durian di Kabupaten Sambas (42,11%), pisang di Kabupaten Pontianak (35,46%), dan nenas di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang masing-masing sebesar 49, 26 persen dan 35,44 persen.

Tabel Produksi Tanaman Buah-Buahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013

Tahun/Keterangan	Durian	Jeruk	Nenas	Pisang	Pepaya	Rambutan	Duku
2009	32.387	169.029	34.874	111.728	10.585	19.953	6.953
2010	28.057	145.663	56.185	38.225	10.665	14.505	15.687
2011	23.635	109.334	73.816	46.765	11.124	11.660	12.608
2012	25.100	171.558	108.704	534.454	9.521	21.437	4.064
2013	21.110	154.304	90.570	59.121	9.812	14.540	5.967
Rata-rata produksi/th	26.058	149.978	72.830	61.859	10.341	16.419	9.056
Pertumbuhan (%/th)	-3,08	1,06	20,70	-2,78	-0,18	3,54	27,36

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2014), diolah

Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan memberikan kontribusi produksi yang didominasi oleh kelapa sawit dan karet, sedangkan untuk komoditas kelapa dalam merupakan urutan ketiga. Usaha perkebunan umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkebunan besar diantaranya mengusahakan karet, kelapa sawit dan kelapa hibrida, namun hanya kelapa sawit dan karet yang sudah beroperasi secara konsisten.

Tabel Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

Tahun	Karet		Sawit		Kelapa Dalam	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)
2008	556.394	227.549	507.472	845.309	99.286	69.934
2009	571.321	234.181	611.182	865.391	100.056	72.160
2010	581.664	245.813	750.948	921.560	99.968	73.667
2011	588.229	249.095	880.767	967.626	100.470	73.964
2012**	590.127	251.252	885.189	973.534	100.305	72.494
Rata-rata produksi/th	569.672	238.503	680.457	900.016	100.009	71.859
Pertumbuhan (%/th)	2,17	2,41	14,59	3,35	0,27	1,03

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2014), diolah, ** Angka Sangat Sementara (Disbun, 2013)

Dari ketiga produk unggulan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi produksi yang paling tinggi adalah produksi sawit yang memberikan pertumbuhan produksi rata-rata 3,35 persen per tahun. Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar. Selain ketiga jenis tanaman di atas, beberapa tanaman perkebunan yang lain yang diusahakan di Kalimantan Barat adalah tanaman kopi, lada dan kakao.

Subsektor Peternakan

Subsektor peternakan di Kalimantan Barat berperan sebagai penyumbang protein yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditas yang sudah dikembangkan seperti ayam, sapi, kambing dan babi, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Produksi Ternak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 (ton)

Tahun	Sapi	Kambing	Babi	Ayam	Itik
2008	5.875	508	6.522	29.295	99
2009	6.927	664	6.842	28.590	79
2010	8.360	609	10.624	33.454	166
2011	7.081	621	10.336	33.568	349
2012**	7.263	474	18.516	48.289	518
Rata-rata produksi/th	6.839	560	9.846	33.170	214
Pertumbuhan (%/th)	6,41	1,05	28,24	14,45	56,47

Tahun 2013, untuk populasi golongan ternak besar, tercatat sebanyak 140.204 ekor sapi, sedangkan kerbau sebanyak 2.219 ekor. Untuk golongan ternak kecil populasi terbesar adalah babi yaitu 413.508 ekor, sedangkan kambing tercatat 167.471 ekor. Untuk perkembangan populasi ternak unggas, hampir seluruh jenis ternak unggas seperti ayam

ras, ayam tas petelur dan bebek mengalami penurunan, sedangkan untuk ayam buras mengalami peningkatan.

Pertumbuhan subsektor peternakan menunjukkan nilai positif selama lima tahun terakhir. Kondisi peningkatan ini didukung oleh Program Ketahanan Pangan dan Swasembada Daging tahun 2014. Akan tetapi, peningkatan daging sapi dan kambing tersebut masih belum memenuhi kebutuhan daerah karena daerah belum mampu menyediakan bibit/benih ternak, sehingga masih bergantung kepada produk bibit/benih dari luar Kalimantan Barat. Dengan demikian, setiap tahun daerah masih harus mengimpor sapi dan kambing dari luar Kalimantan Barat.

Produksi daging sapi yang berasal dari pemotongan ternak untuk tahun 2013 sebesar 7.428 ton naik 2,27 persen dibandingkan tahun 2012, kambing produksinya meningkat 6,96 persen sedangkan daging babi sebesar 24.582 ton atau naik 32,76 persen. Produksi daging, khususnya sapi terutama berasal dari Kota Pontianak, sementara produksi ayam ras potong terbesar berasal dari Kabupaten Kubu Raya. Sementara untuk daging lainnya lebih merata di semua kabupaten/kota.

Produksi telur pada tahun 2013 secara umum meningkat jika dibanding tahun 2012, telur ayam buras meningkat 2,34 persen, telur ayam ras petelur yang paling banyak dikonsumsi masyarakat naik 2,60 persen, sedangkan telur itik menurun 1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Subsektor Perikanan

Secara geografis, Kalimantan Barat memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan, baik perikanan laut maupun perairan umum. Jumlah ruang tangga perikanan pada tahun 2012 adalah perikanan laut sebanyak 13.231 rumah tangga, perairan umum sebanyak 4.896 rumah tangga dan perikanan budidaya sebanyak 26.708 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir sektor perikanan memberikan kontribusi baik produksi serta nilai finansial dari produk-produknya. Berdasarkan data dari 2008 sampai 2012 produksi sektor perikanan menunjukkan peningkatan yang bersumber dari laut, perairan umum maupun budidaya.

Tabel Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

Tahun	Produksi (Ton)			Nilai Produksi (Rp Juta)		
	Laut	Umum	Budidaya	Laut	Umum	Budidaya
2008	75.997	7.665	14.889	904.332	105.604	348.543
2009	722.261	8.784	15.205	831.121	119.647	324.340

2010	86.120	9.666	27.039	991.041	151.968	1.554.484
2011	94.063	9.839	33.878	989.276	172.584	1.119.858
2012**	94.796	9.319	35.572	1.421.938	158.423	1.173.882
Rata-rata produksi/th	81.511	8.844	22.642	955.413	135.600	785.855
Pertumbuhan (%/th)	7,94	3,90	34,17	21,35	9,18	85,61

Sumber : BPS Kalimantan Barat (2013), ** Angka Sangat Sementara (DKP, 2013)

Jika dilihat dari alat penangkapannya, rumah tangga perikanan di perairan laut didominasi oleh kapal motor. Sementara nelayan di perairan umum lebih banyak menggunakan perahu bermotor. Pada usaha budidaya perikanan, pengusaha lahan bersih rata-rata seluas 0,29 Ha.

Subsektor Kehutanan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas keempat setelah Provinsi Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah atau 6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 259/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 kawasan hutan di Kalimantan Barat mencakup area seluas 9.178.760 Ha, yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 3.932.625 ha dan Kawasan Budidaya seluas 5.246.135 ha.

Dalam kawasan lindung, Hutan Lindung memiliki area terluas yaitu 2.307.045 ha, kemudian Hutan Taman Nasional seluas 1.252.895 ha. Kawasan Budidaya didominasi oleh Hutan Produksi Terbatas (2.445.985 ha) dan Hutan Produksi Biasa (2.265.800 ha), sedangkan Hutan Produksi Konversi hanya mencapai 514.350 ha. Dari luas Kawasan hutan tersebut terdapat lahan kritis seluas 2.069.158 ha yang perlu direhabilitasi. Tahun 2013 luas lahan kritis terluas terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 77,47 persen dari luas lahan kritis di Kalimantan Barat. Luas lahan kritis di dalam kawasan maupun di luar kawasan hampir sama besarnya yaitu masing-masing 50 persen dari total lahan kritis.

Potensi Sektor Pertambangan

Potensi sumberdaya mineral dan batubara adalah emas, bauksit, timah, bijih besi, mangan, galena, zirkon, pasir kuarsa, kaolin, lempung, granit, andesit, batubara dan gambut. Selain itu juga ditemukan uranium. Sumberdaya dan cadangan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel Potensi Jenis Bahan Galian dan Sumberdaya Mineral Tambang di Provinsi Kalimantan Barat (ton)

NO	Bahan Galian	Sumberdaya	NO	Bahan Galian	Sumberdaya
1	Uranium	24.112	14	Kaolin	316.908.857
2	Batubara	181.662.875	15	Feldspar	1.233.667
3	Besi	152.277.725	16	Pasir	17.691.812.399
4	Mangan	3.250.000	17	Granit	1.565.412.260.771
5	Bauksit	3.268.533.344	18	Sirtu	110.852.994.293
6	Timbal	445.593	19	Trakhit	97.000.000.000
7	Seng	34.064	20	Mika	524
8	Emas	83.200.020	21	Pasir Kuarsa	631.531.456
9	Air Raksa	5.306.283	22	Andesit	1.040.991.360.189
10	Barit	1.932	23	Basalt	6.450.088.134
11	Intan (karat)	6.281	24	Permata	819
12	Gambut	12.577.145.000	25	Gamping	30.000.000
13	Ball Clay	21.400	26	Zirkon	167.141.100

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat (2011)

Berdasarkan data Dinas ESDM Kalimantan Barat (2011), terdapat 49 perusahaan yang memiliki IUP Bauksit, dengan luas total yang dikuasai sekitar 557.259 Ha. Dua puluh tujuh perusahaan diantaranya berada di Kabupaten Sanggau dengan luas 247.338 ha sementara di Kabupaten Landak sebanyak delapan perusahaan (57.217 ha), Kabupaten Kayong Utara lima perusahaan (9.985 ha), Kabupaten Pontianak tiga perusahaan (935.250 ha) dan di perbatasan antar kabupaten/kota sebanyak empat perusahaan (197.970 ha).

Tabel Sumberdaya dan Cadangan Hasil Eksplorasi Pemegang Izin di Provinsi Kalimantan Barat

No	Mineral	Sumberdaya Biji (ton)	Cadangan Biji (ton)	Rencana Tingkat Produksi (per tahun)
1	Bauksit	3.268.533.344	1.129.154.090	52.430.000
2	Biji Besi	152.277.725	23.461.377	3.000.000
3	Mangan	3.250.000	500.000	204.000
4	Emas	83.200.020	42.588.751	1.594.000
5	Zirkon	167.141.100	44.700	2.529.600
6	Ball Clay	21.400.500	650.000	60.000

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat (2011)

Jumlah sumberdaya bauksit di wilayah ini diperkirakan cukup besar, yaitu sekitar 3,29 miliar ton. Kabupaten Sanggau dan lokasi yang berada di wilayah perbatasan dua kabupaten adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bauksit terbesar masing-masing 1,28 miliar ton dan 1,02 miliar ton. Masa berlaku IUP tersebut berkisar antara 2 sampai 20 tahun. Dari 49 IUP tersebut sebagian perusahaan telah melakukan penambangan bijih bauksit, diantaranya PT Antam, PT Harit Prima, dan PT Alu Sentosa. Sejak tahun 2008 hingga

tahun 2011 perusahaan-perusahaan tersebut telah mengapalkan bijih bauksit sebesar 40.343.201 ton (2008 = 7.097.647 ton; 2009 = 6.345.554 ton; 2010 = 12.500.000 ton, dan 2011 = 14.400.000 ton) ke negara Jepang dan Cina.

Tabel Produksi Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2011

No	Mineral	2008	2009	2010	2011
1	Emas (kg)	3.250,23	4.305,00	2.464,39	3.397,00
2	Timah (ton)	1.557,00	1.000,00	211,00	200,00
3	Besi (ton)	200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1550.000,00
4	Mangan	300,00	250,00	200,00	5.250,00
5	Bauksit (ton)	7.097.647,00	6.345.554,00	12.500.000,00	14.400.000,00
6	Zirkon (ton)	4.482,00	3.000,00	7.000,00	45.000,00
7	Kaolin (ton)	6.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
8	Ball Clay (ton)	45.000,00	45.000,00	65.000,00	60.000,00
9	Pasir Kuarsa (ton)	400.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10	Intan (krat)	135,00	120,00	120,00	120,00
11	Kuarsa (ton)	4,50	3,00	3,00	3,00
12	Andesit (ton)	565.850,00	500.000,00	550.000,00	590.000,00
13	Basal (ton)	190.450,00	250.000,00	230.000,00	250.000,00
14	Granit (ton)	1.400.350,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
15	Pasir Sungai (ton)	875.550,00	1.482.775,00	1.500.000,00	2.000.000,00
16	Sirtu (ton)	725.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat (2011)

Potensi Infrastruktur dan Logistik

Panjang jalan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 adalah sepanjang 13.840 km terdiri dari Jalan nasional 1.665 km (12,03%) dan Jalan Provinsi 1.562 km (11,29%) serta jalan Kabupaten/Kota 10.613 km (76,685). Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2009-2013 panjang jalan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan, terutama panjang jalan yang berada di bawah pengawasan kabupaten/kota yang menurun tajam dari 13.392 km pada tahun 2009 menjadi 10.613 km pada tahun 2013 atau menurun sekitar 16,73%. Padahal seharusnya panjang jalan terus tumbuh untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel Panjang Jalan di Provinsi Kalimantan Barat menurut Status

Tahun	Panjang Jalan (Km)			
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
2009	1.667	1.562	13.392	16.621
2010	1.667	1.562	12.062	15.291
2011	1.665	1.562	10.595	13.822
2012	1.665	1.562	10.595	13.822
2013	1.665	1.562	10.613	13.840

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Dari keseluruhan jalan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (13.840 km) pada tahun 2013, hanya sekitar 47 persen (6.507 km) dari panjang jalan yang mempunyai permukaan yang diaspal, sedangkan selebihnya berupa jalan tanah (38,10 %), kerikil (12,63%), dan lainnya (2,25%). Apabila dilihat lebih rinci menurut status pengawasan, terlihat bahwa jalan yang berada di bawah pengawasan kabupaten/kota didominasi oleh jalan tanah (47,40%). Sebaliknya untuk jalan yang berada di bawah pengawasan negara dan provinsi didominasi oleh jalan aspal, masing-masing dengan 93,12 persen dan 78,24 persen.

Tabel Jenis Permukaan Jalan Menurut Status Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Status Pengawasan	Panjang Jalan (Km)					Persentase			
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lain	Jumlah	Aspal	Kerikil	Tanah	Lain
Negara	1.550,03	93,21	21,31	0	1.664,55	93,12	5,60	1,28	0
Provinsi	1.222,28	119,75	220,27	0	1.562,30	78,24	7,600	14,10	0
Kabupaten/Kota	3.734,92	1.535,19	5.031,04	311,91	10.613,06	35,19	14,47	47,40	2,94
Jumlah	6.507,23	1.748,15	5.272,62	311,91	13.839,91	47,02	12,63	38,10	2,25

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Sementara itu, kondisi jalan nasional sepanjang 1.533,76 km (92,14%) dalam kondisi mantap, sementara 130,79 km (7,86%) sisanya dalam kondisi tidak mantap. Untuk jalan provinsi sepanjang 1.239,07 km (79,31%) dalam kondisi mantap, sedangkan 323,23 km (20,69%) dalam kondisi tidak mantap. Sementara untuk jalan Kabupaten/Kota sepanjang 5.857 km (55,19%) dalam kondisi mantap, dan 4.755 km (44,81%) dalam kondisi tidak mantap.

Tabel Kondisi Jalan menurut Status Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Status Pengawasan	Panjang Jalan (Km)			Persentase	
	Mantap	Tidak Mantap	Jumlah	Mantap	Tidak Mantap
Negara	1.533,76	130,79	1.664,55	92,14	7,86
Provinsi	1.239,07	323,23	1.562,30	79,31	20,69
Kabupaten/Kota	5.857,86	4.755,20	10.613,06	55,19	44,81
Jumlah	8.630,69	5.209,22	13.839,91	62,36	37,64

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), diolah

Banyaknya kondisi jalan yang tidak mantap disebabkan oleh alokasi anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani serta masih banyaknya kendaraan yang lewat melebihi daya dukung jalan, sehingga mengakibatkan

tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi. Untuk itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus bersinergi dalam peningkatan jalan dan jembatan untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tingkat aksesibilitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses setiap kendaraan, melalui rasio dengan perbandingan panjang jalan yang tersedia per jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana prasarana jalan yang memberikan akses ke tiap kendaraan. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan rasio antara 0,008-0,024 dengan kecenderungan penurunan rasio. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa penambahan panjang ruas jalan tidak mendukung penambahan jumlah kendaraan.

Tabel Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan (Negara, Provinsi, Kab/Kota)	16.618	15.289	13.822	13.822	13.840
Jumlah Kendaraan	1.038.644	639.233	1.448.773	1.651.973	1.825.440
Rasio	0,016	0,024	0,010	0,008	0,008

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), diolah

Tabel Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2008-2012

Uraian	Jumlah Penumpang (org)/Barang (ton)				
	2008	2009	2010	2011	2012**
Penumpang (orang)	1.946.00 1	2.163.17 1	2.444.01 4	3.042.89 8	3.254.62 1
- Angkutan Umum melalui perbatasan (terminal)	179.118	179.118	108.738	222.876	239.720
- Kapal laut pelayaran dalam dan luar negeri (dermaga)	305.812	296.924	391.661	482.926	464.106
- Pesawat udara berangkat datang (Bandara)	1.461.07 1	1.687.12 9	1.943.61 5	2.337.09 6	2.550.79 5
Barang (ton)	5.280.11 9	3.688.45 6	5.608.48 4	4.714.17 5	3.489.85 3
- Bongkar muat barang di pelabuhan laut dalam/luar negeri (dermaga)	5.252.97 1	3.675.52 1	5.578.48 2	4.680.85 3	3.454.17 5
- Arus barang/bagasi/pos paket menurut pelabuhan udara (Bandara)	27.148	12.935	30.002	33.322	35.678

Sumber : Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat (2012), ** Angka sangat sementara

Perkembangan jumlah penumpang dari terminal, dermaga dan bandara pada tahun 2008 sebesar 1.946.001 orang, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 3.254.621 orang. Untuk barang dari dermaga dan bandara mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan tabel diatas, sedangkan arus kunjungan kapal ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel Arus Kunjungan Kapal menurut Pelabuhan dan Jenis Pelayanan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

No	Pelabuhan	Luar Negeri		Dalam Negeri		Jumlah	
		Unit	GRT	Unit	GRT	Unit	GRT
1	Sintete	3	1.917	236	97.895	239	99.812
2	Ketapang	9	70.905	706	220.098	715	291.003
3	Singkawang	0	0	51	9.810	51	9.810
4	Pemangkat	0	0	331	6.755	331	6.755
5	Pontianak	351	1.200.390	4.646	7.273.724	4.997	8.474.114
	Jumlah	363	1.273.212	5.970	7.608.282	6.333	8.881.494

Sumber : PT (persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak (2014)

Dengan kondisi akses jalan yang masih terbatas dan didukung dengan kondisi sungai yang cukup lebar, angkutan sungai juga memegang peranan penting bagi masyarakat Kalimantan Barat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya kondisi perhubungan udara ditunjukkan melalui arus pesawat terbang dan penumpang pesawat udara pada tabel dibawah ini.

Tabel Data Operasional Angkutan Sungai di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012*
1	Kapal Motor	Unit	3.014	3.224	3.226	3.230	3.336
2	Jumlah Penumpang	Orang	48.950	23.242	21.421	21.560	19.046
3	Kapal Barang	Unit	654	660	796	801	872
4	Jumlah Barang	Ton	25.659	47.535	49.630	50.231	62.216

Sumber : Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat (2012), * Angka Prediksi

Tabel Lalu Lintas Angkutan Udara Menurut Pelabuhan Udara di Provinsi Kalimantan Barat

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012*
1	Kapal Motor	Unit	3.014	3.224	3.226	3.230	3.336
2	Jumlah Penumpang	Orang	48.950	23.242	21.421	21.560	19.046
3	Kapal Barang	Unit	654	660	796	801	872
4	Jumlah Barang	Ton	25.659	47.535	49.630	50.231	62.216

Sumber : Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat (2012), * Angka Prediksi

Bandar Udara di Kalimantan Barat yang beroperasi saat ini sebanyak lima buah, yaitu Bandara Supadio di Kabupaten Kubu Raya sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, Bandara Rahadi Usman di Ketapang, Bandara Susilo di Sintang, dan Bandara Pangsuma di Putussibau yang merupakan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, sedangkan Bandar Udara pengumpan ada di Kota Nanga Pinoh.

Meskipun sektor pertanian pertambangan dan perindustrian di Kalimantan Barat cukup potensial, namun hingga saat ini pemerintah daerah belum bisa mengelola kekayaan alam tersebut dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan akses transportasi dan minimnya sarana penunjang sehingga menyulitkan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

Dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana di Kalimantan Barat tersebut, terdapat beberapa peranan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas pelayanan Bandar Supadio sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer dan bandara pendukungnya di Ketapang, Sintang, Putussibau, Nanga Pinoh dan Paloh.
2. Pembangunan pelabuhan di Pulau Temajo sebagai pelabuhan Internasional dan peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan internasional, serta peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan di Ketapang, Kendawangan, Sintete, Sambas, Paloh/Sekura dan Teluk Air sebagai pelabuhan nasional.
3. Peningkatan kerjasama regional untuk peningkatan interaksi antar wilayah, yaitu 1) dengan Sarawak melalui pemantapan kondisi jalan dan jembatan di sepanjang daerah perbatasan, b) dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dalam rangka pengembangan lintas batas provinsi disertai dengan pemantapan kondisi jalan dan jembatan.
4. Pemantapan jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW, jalan trans kalimantan serta jalan antar negara untuk terciptanya keterkaitan internal yang kuat antar pusat pengembangan utama dengan subpusat pengembangannya.
5. Optimalisasi pemanfaatan jaringan jalan regional, terutama pada wilayah-wilayah yang potensial berkembang untuk memacu pengembangan wilayah secara menyeluruh.
6. Memantapkan upaya peningkatan pengembangan jaringan jalan secara terpadu antara jalan umum dan jalan khusus.
7. Pengembangan dan pemantapan prasarana jalan pada sentra-snetra pengembangan pertanian/perkebunan untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan agroindustri.

8. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana penyebrangan untuk memperlancar hubungan Rasau Jaya-Teluk Batang-Teluk Melon, Sungai Sumpik-Ceremai, Teluk Kalong-Tanjung Harapan, dan Manismata-Sukamara.
9. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sungai bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan moda transportasi darat.

Pengembangan pelabuhan udara dilakukan dalam klasifikasi sebagai berikut :

1. Pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer, diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama untuk keluar negeri,
2. Pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder, diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer.
3. Pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier, diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubung dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder.
4. Bukan pusat penyebaran, diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

Berdasarkan ketentuan diatas, arahan pengembangan prasarana transportasi udara dalam masa rencana adalah sebagai berikut :

1. Bandar Supadio dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan primer.
2. Bandara Rahadi Usman di Kota Ketapang dan Bandara Pangsuma di Kota Putussibau dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder.
3. Bandara Susilo di Kota Sintang, dan Paloh di Sambas dikembangkan sebagai bandara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier.
4. Bandara di Nanga Pinoh dikembangkan sebagai bandara bukan pusat penyebaran.
5. Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk memperlancar hubungan daerah dengan wilayah lainnya terutama untuk kegiatan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar pulau. Arahan pengembangan prasarana transportasi laut dalam masa rencana adalah sebagai berikut :
6. Optimalisasi pemanfaatan pelabuhan penumpang di Pontianak.
7. Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Temajo dikembangkan sebagai pelabuhan internasional.
8. Pelabuhan Ketapang, Kendawangan, Sambas, Sintete, Paloh/Sekura dan Teluk Air dikembangkan sebagai pelabuhan nasional.

9. Pelabuhan Teluk Batang, Singkawang dan Merbau dikembangkan sebagai pelabuhan regional.

Jaringan transportasi darat di Kalimantan Barat yang diarahkan pengembangannya meliputi: 1) jaringan jalan darat, 2) jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, serta 3) jaringan jalur kereta api. Pengembangan jaringan jalan darat diiringi dengan :

1. Pembangunan Terminal tipe A di Kuala Ambawang (kota Ambaya) yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara (LBN), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan (pasal 41 PP No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu Lintas Jalan).
2. Pengembangan enam kawasan lintas batas negara (gerbang darat internasional), yakni di Entikong (Sanggau), Nanga Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang), Aruk (Sambas), Jasa (Sintang), dan Temajuk (Sambas, untuk pariwisata Temajuk-Melano).
3. Pengembangan tiga kawasan lintas batas provinsi (gerbang darat interregional) yakni di Kudangan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (poros selatan), Nanga Melaban Ella (Menukung) dengan Provinsi Kalimantan Tengah (poros tengah), dan Bungan (Kedamin) dengan Provinsi Kalimantan Timur (poros utara).

Jalur pelayaran sungai memiliki peranan ganda dikaitkan dengan jalur transportasi jalan raya. Di satu sisi pelayaran sungai merupakan pelengkap sistem transportasi jalan raya dan di sisi lain pelayaran sungai ini berperan sebagai alternatif lain bagi transportasi darat. Pada keadaan normal, di Kalimantan Barat terdapat banyak sungai yang dapat dilayari, diantaranya yang utama adalah Sungai Kapuas dengan panjang sekitar 1.086 km yang dalam keadaan normal secara efektif dapat dilayari sepanjang 870 m, Sungai Sambas (dengan panjang 233 km) di Kabupaten Sambas, Sungai Pawan, Sungai Kendawangan, dan Sungai Jelai di Kabupaten Ketapang.

Selain lalu lintas angkutan sungai, di Kalimantan dioperasikan angkutan penyeberangan sebanyak enam lintasan penyeberangan yang menghubungkan jalan raya yang terputus oleh aliran sungai, Lintasan Penyeberangan Bardan (Pontianak)-Siantan merupakan lintasan penyeberangan yang dioperasikan oleh pihak swasta (PT Prima Vista), sedangkan lima lintasan penyeberangan lainnya dioperasikan oleh PT ASDP Cabang Pontianak. Kelima lintasan penyeberangan tersebut adalah lintasan penyeberangan Tayan-Piasak di Kabupaten Sanggau yang berperan untuk menunjang jalan raya lintas Kalimantan-Tayan-Ketapang, lintasan penyeberangan Telok Kalong-Tanjung Harapan dan Tebas Kuala-Perigi Piai di Kabupaten Sambas yang berperan menunjang jalan raya antara Sambas-Paloh sepanjang 45 km, lintasan penyeberangan Rasau Jaya-Telok Batang melintasi sungai

dan selat dengan panjang lintasan 140 km yang menghubungkan daerah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya, dan lintasan penyeberangan yang baru dibuka adalah penyeberangan Parit-Sarem-Sungai Nipah di Kabupaten Kubu Raya.

Beberapa pelabuhan laut yang penting sebagai pintu gerbang ekonomi yang merupakan pintu keluar masuknya barang dan penumpang antar pulau dan internasional adalah pelabuhan Pontianak, Sintete Kabupaten Sambas), Telok Air di Batu Ampar, dan Pelabuhan Ketapang (Kabupaten Ketapang). Pelabuhan Pontianak adalah pelabuhan kelas satu di bawah pengelolana PT Pelabuhan Indonesia II (persero) dan merupakan pelabuhan terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dengan fungsi pelayanan sebagai pelabuhan internasional terletak di pinggir Sungai Kapuas Kecil dengan jarak 31 km dari muara sungai dan dapat ditempuh sekitar 2 jam pelayaran.

Pelabuhan Sintete merupakan pelabuhan nasional, akan tetapi pada umumnya melayani hubungan pelayaran antara Kalimantan Barat dengan negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan sampai ke Jepang. Pelabuhan Sambas dan Singkawang hanya terbuka untuk pelayaran antar pulau, yaitu melayani hubungan pelayaran Kalimantan Barat dengan daerah di Pulau Sumatera dan tidak terbuka untuk pelayaran internasional. Pelabuhan Telok Air dan Ketapang banyak melayani hubungan laut Kalimantan Barat dengan kota-kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Sistem transportasi udara Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh lima lokasi lapangan udara yang tersebar di empat kabupaten. Dua bandara yaitu Bandara Supadio di Pontianak dan Bandara Rahadi Usman di Ketapang, dipergunakan untuk melayani jalur-jalur penerbangan eksternal (dari dan ke luar provinsi), sedangkan bandara lain yaitu Bandara Pangsuma di Putussibau, Bandara Susilo di Sintang dan Bandara Nanga Pinoh (Kabupaten Sintang) merupakan bandara yang hanya melayani jalur penerbangan lokal (antar kabupaten). Dengan demikian, secara keseluruhan di Kalimantan Barat ada empat jalur penerbangan lokal, empat jalur penerbangan antar provinsi dan dua jalur penerbangan internasional.

Kebijakan Pengembangan Industri

Sektor industri sampai dengan tahun 2013 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang

disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor/Subsektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	25,71	25,05	25,13	24,02	23,08
	a. TBM	8,90	8,63	8,59	8,43	8,40
	b. Tanaman Perkebunan	8,83	8,76	9,27	8,66	8,29
	c. Peternakan dan hasilnya	2,57	2,47	2,33	2,26	2,11
	d. Kehutanan	2,82	2,63	2,46	2,32	2,11
	e. Perikanan	2,59	2,57	2,47	2,35	2,18
2	Pertambangan dan penggalian	1,93	1,99	2,03	2,00	2,01
3	Industri pengolahan	18,96	18,40	17,94	17,01	16,27
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,52	0,52	0,50	0,47	0,45
5	Bangunan	8,86	9,23	9,94	10,80	11,48
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,34	22,74	21,82	22,04	22,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,12	7,33	5,62	5,36	5,33
8	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	4,83	4,80	4,86	4,84	4,86
9	Jasa-jasa	9,73	9,94	9,69	10,80	11,48
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24, 15 persen. Pada tahun 2008 kontribusi industri pengolahan mencapai 19,49 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi hanya 16,27 persen.

Kontribusi sektor industri berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Selain berakibat padalambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditi-komoditi primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan.

Tabel Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 (%)

No	Sektor/Subsektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	25,27	24,99	24,65	24,20	24,48
	a. TBM	10,12	10,06	9,76	9,43	9,76
	b. Tanaman Perkebunan	8,95	8,85	8,94	8,97	9,16
	c. Peternakan dan hasilnya	2,74	2,71	2,67	2,63	2,56
	d. Kehutanan	1,27	1,20	1,13	1,07	0,99
	e. Perikanan	2,20	2,17	2,14	2,09	2,02
2	Pertambangan dan penggalian	1,72	1,78	1,79	1,78	1,76
3	Industri pengolahan	17,34	16,83	16,28	15,88	15,62
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,43	0,44	0,43	0,42	0,42
5	Bangunan	8,21	8,44	8,70	9,03	9,01
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,07	21,11	21,19	21,35	21,22
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,87	9,28	9,69	9,75	9,85
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,56	5,55	5,63	5,68	5,69
9	Jasa-jasa	11,53,	11,60	11,65	11,90	11,96
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbagai sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu yang peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi daya ungkit terhadap perekonomian.

Tabel Pertumbuhan Sektoral Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013

No	Sektor/Subsektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	3,99	4,24	4,56	3,88	7,34
2	Pertambangan dan penggalian	9,03	8,96	7,07	5,15	4,70
3	Industri pengolahan	0,80	2,23	2,61	3,26	4,29
4	Listrik, Gas dan Air Minum	4,36	7,17	3,91	4,62	4,48
5	Bangunan	7,58	8,23	9,44	9,78	5,84
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,90	5,57	6,49	6,60	5,42
7	Pengangkutan dan Komunikasi	13,29	10,21	10,69	6,56	7,06
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	4,99	6,58	6,16	6,76	6,41

No	Sektor/Subsektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
9	Jasa-jasa	5,90	6,08	6,53	8,07	6,55
	Pertumbuhan	4,80	5,47	5,98	5,81	6,08

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Bagaimanapun, ke depan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Pada masa yang akan datang pengembangan industri diarahkan di kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh kabupaten/kota melalui RTRW kabupaten/kota dan untuk pengembangan Kawasan Industri diarahkan pada daerah-daerah yang mempunyai akses kepada jalan arteri primer dimana berdasarkan RTRW Kalimantan Barat meliputi :

1. Jalan Bebas Hambatan Tayan-Pontianak-Sungai Pinyuh (eksisting)
2. Sungai Pinyuh–Mempawah-Sungai Duri–Singkawang–Pemangkat-Tebas Sambas (rencana)
3. Pontianak-Tayan-Sosok-Tanjung-Kembayan-Balai Karangan-Entikong-Batas Serawak (Eksisting)
4. Tanjung-Sanggau-Sekadau-Tebelian-Sintang-Putussibau-Batas kalimantan Timur (rencana)
5. Tayan-Balai Berkuak-Aur Kuning–Sandai-Nanga Tayap-Batas Kalimantan Tengah (eksisting)
6. Simpang Dua-Teluk Melano-Teluk Batang (rencana)
7. Nanga Tayap-Tumbang Titi–Pelang—Ketapang (rencana)
8. Pelang-Kendawangan (rencana)

Pengembangan industri dan perdagangan secara pola ruang diarahkan pada kawasan strategi nasional dan provinsi yang mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi, dimana untuk kawasan strategis Nasional telah ditetapkan KSN Kapet, sedangkan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata
2. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri
3. Kawasan industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri
4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri
5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan.
6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan
7. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Pontianak dengan sektor unggulan pertambangan
8. Kawasan Pertambangan Batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan
9. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan
1. Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengarahkan pengembangan kawasan industri berada di Semparuk (kabupaten Sambas), Singkawang (kota Singkawang), Sungai Raya Kepulauan (Kabupaten Bengkayang), Sungai Kunyit (Kabupaten Mempawah), Mandor (Kabupaten Landak), Pontianak (Kota Pontianak), Tayan (Kabupaten Sanggau), Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara), Ketapang (Kabupaten Ketapang), Kendawangan (Kabupaten Ketapang), dan Sintang (Kabupaten Sintang), dan Kawasan Industri Khusus Pertambangan di Sungai Kunyit (Kabupaten Mempawah), Tayan (Kabupaten Sanggau), Kendawangan (Kabupaten Ketapang), dan Tanjung Api (Kabupaten Sambas).

Strategi pengembangan industri lebih diarahkan pada revitalisasi industri melalui peluang hilirisasi komoditi utama daerah dan penguatan struktur industri daerah yang berkelanjutan. Inti dari strategi ini adalah penumbuh kembangan industri pengolahan komoditi utama unggulan daerah yang didukung penguatan peranan industri kecil dan menengah, dan pengembangan industri peralatan dan mesin serta alat angkut yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, serta fasilitasi bagi usaha industri untuk tumbuh dan berkembang berbasis kawasan,

kompetensi inti daerah, kreativitas intelektual an kelestarian lingkungan. Kebijakan pengembangan industri dilaksanakan melalui :

1. Pengembangan subsistem industri hilir yang terintegrasi dengan berbasis pada industri pengolahan hasil perkebunan pertanian dan perikanan serta pertambangan yang berdaya saing;
2. Penumbuhkembangan industri kecil dan menengah unggulan provinsi berbasis sumberdaya lokal melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), kompetensi inti daerah dan kreativitas intelektual serta nilai luhur masyarakat Kalimantan Barat;
3. Penumbuhkembangan industri peralatan, mesin dan alat angkut yang mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
4. Perindustrian atau industri pengolahan memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat tahun 2008 sebesar 19,49 persen dan 2011 sebesar 17,94 persen dan tahun 2013 sebesar 16, 27 persen. Kontribusi sektor industri mengalami penurunan dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir industri Kalimantan Barat masih bertumpu pada industri pengolahan kayu yang secara perlahan peranan industri kayu mengalami penurunan dengan sulitnya bahan baku kayu. Disamping itu, terbatasnya infrastruktur dasram pelabuhan dan energi menjadi kendala utama masuknya investasi industri skala besar.
5. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kalimantan Barat, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makan (industri berbasis CPO) dan industri karet yang merupakan komoditas utama daerah.

Potensi Energi Berbasis Sumberdaya Alam

Sesuai laporan PT PLN Wilayah V Kalimantan Barat, produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada sebelas lokasi pembangkit dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,35 persen per tahun. Pembangkit listrik di Kalimantan Barat terdiri dari pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta, dan captive power serta pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) dengan kapasitas listrik terpasang pada tahun 2011 sebesar 421.630 kW, kapasitas mampu 346.194kW dn beban puncak sebesar 289.179 kW. Pada akhir tahun 2011 elektrifikasi sebesar 59,85 persen dengan jumlah pelanggan 653.383 pelanggan, sementara rasio desa berlistrik berdasarkan data PLN sebesar 55,71 persen. Persentase rumah tanga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 diantara 46,08 sampai 51,66 persen untuk tahun 2012 menjadi 61,11 persen.

Tabel Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Provinsi Kalimantan Barat

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**
Rumah Tangga Pengguna Listrik	475.712	486.764	518.412	589.263	734.444
Jumlah Rumah Tangga	1.014.565	1.056.325	1.097.368	1.151.987	1.201.813
Persentase RT Pengguna Listrik	46,89	46,08	47,24	51,15	61,11

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2009-2012), ** Angka sangat sementara

Persentase kebutuhan listrik rumah tangga terhadap produksi listrik terus mengalami kenaikan sesuai data tahun 2008 sebesar 46,89 persen terus meningkat menjadi 51, 15 persen (tahun 2011) dan diprediksi ke depan tahun 2012 meningkat menjadi 62,45 persen. Pelanggan yang terbanyak dalam penggunaan listrik dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah pelanggan rumah tangga yang meningkat rata-rata sebesar 4, 26 persen, diikuti pelanggan komersial/usaha sebesar 9,16 persen.

Tabel Persentase Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Terhadap Produksi Listrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**
Kebutuhan Rumah Tangga (jt kWh)	590,49	661,44	749,69	868,71	988,00
Produksi Listrik (jt kWh)	1.069,81	1.155,65	1.288,97	1.434,71	1.582,16
Kebutuhan RT terhadap Produksi Listrik (%)	55,20	57,24	58,16	60,55	62,45

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2009-2012), ** Angka sangat sementara

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam baru dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik antara lain tenaga surya, angin, air dan uranium. Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi garis khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa Kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW.

Hasil penelitian BATAN mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Pemerintah Kalimantan Barat

telah mengupayakan untuk mendorong pemerintah pusat agar pemanfaatan potensi uranium dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar PLTN. Hal ini seiring dengan ditetapkannya UU No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran.

Tabel Jumlah Rekapitulasi Potensi Energi Air di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Bulan Februari 2011

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012**
Kebutuhan Rumah Tangga (jt kWh)	590,49	661,44	749,69	868,71	988,00
Produksi Listrik (jt kWh)	1.069,81	1.155,65	1.288,97	1.434,71	1.582,16
Kebutuhan RT terhadap Produksi Listrik (%)	55,20	57,24	58,16	60,55	62,45

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2009-2012), ** Angka sangat sementara

Potensi sumberdaya alam yang merupakan sumber energi terbarukan (EBT) yang memiliki prospek yang cukup tinggi untuk diolah lebih jauh agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,. Namun sampai saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hanya beberapa potensi yang sebagai kecil sudah dimanfaatkan, yaitu potensi energi air dan potensi energi surya di beberapa tempat atau lokasi. Belum adanya infrastruktur dan jaringan listrik yang memadai, memang menyulitkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam tersebut. Meski demikian, sudah ada rencana pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Uap (PTLU) dari batubara.

Dari hasil inventarisasi dan pengumpulan data terhadap potensi EBT di Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat disampaikan potensi-potensi energi tersebut sebagai berikut :

1. Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar, tersebar di beberapa Kecamatan dan kabupaten, dengan total potensi daya mekanik teoritis sebesar 66,9 MW. Suatu potensi yang tidak kecil nilainya, sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.
2. Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Untuk Kalimantan Barat sendiri yang dilintasi garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m², sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses photovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas matahari tersebut.
3. Potensi energi angin cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata per bulan di wilayah

Kalimantan Barat adalah berkisar antara 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 2-26 knot.

4. Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat, yaitu sebesar 626.181 ton per tahun, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 626.181 ton produksi TB per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22 persen atau sekitar 136.659,82 ton CPO. Jika diperkirakan bahwa 50 persen dari CPO tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 68.329,91 ton biodiesel. Jika dianggap 1 liter= 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 68.329.910 liter per tahun. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 17.082.477,5 kW per tahun.
5. Biomassa juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 57.699.468,8 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 524.540.625,45 kWh setiap tahun, karet setara dengan 257.071.995 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 2.337.018.136 kWh per tahun, kelapa setara dengan 60.585.993 SL atau 55.0781.754 kWh per tahun, kopi setara dengan 8.055.477 SLM atau 73.231.609 kWh per tahun, coklat/kakao setara dengan 5.670.405 SLM atau 51.630.954,55 kWh per tahun, tandan kelapa sawit setara dengan 62.618.100 SLM atau 569.255.454,54 kWh per tahun.
6. Potensi energi biogas yang diperoleh dari limbah ternak, yaitu sapi, kerbau, babi maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisis yang dilakukan, maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 33.712.804,66 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 306.480.042,4 kWh.

Sampai saat ini upaya Pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik yang merata bagi seluruh masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi yang ada pada PT PLN (persero) Wilayah Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, PLN telah mengembangkan wilayah kerja menjadi empat cabang (cabang Pontianak, Cabang Singkawang, Cabang Sanggau, Cabang Ketapang) dan satu sektor (sektor Kapuas) yang memasok energi listrik untuk sistem Pontianak, meliputi Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Cabang Pontianak mengelola kelistrikan di Kota dan Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kubu Raya. Cabang Ketapang mengelola kelistrikan untuk Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara. Kelistrikan Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang dikelola oleh cabang Singkawang, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu dikelola oleh Cabang Sanggau.

Saat ini ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan listrik kondisinya makin kritis di berbagai daerah. Penyebabnya antara lain masih rendahnya kemampuan investasi

dan pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana energi, masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah terpasang, serta masih tingginya ketergantungan pembangkit terhadap bahan bakar minyak. Pemenuhan kebutuhan energi yang tidak merata dihadapkan pada luasnya wilayah Kalimantan Barat. Hal itu juga dipengaruhi oleh lokasi potensi cadangan energi primer yang tersebar dan sebagian besar jauh dari pusat beban, keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, tinggi pertumbuhan permintaan berbagai jenis energi setiap tahun, serta kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.

Kapasitas terpasang total mesin pembangkit PT PLN wilayah Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2006 adalah 282.219 MW dengan rasio elektrifikasi 73,07 persen. Pertumbuhan energi listrik yang diproduksi oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat telah mengalami kenaikan yang cukup baik, yaitu hampir tiga kali dari sebesar 894,23 GWh menjadi sebesar 1.069,40 GWh. Sampai dengan tahun 2020 kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1.692,32 MW, sehingga terjadi kekurangan yang sangat besar untuk menutupi kekurangan tersebut. Untuk itu PT PLN Wilayah Kalimantan Barat akan membangun pembangkit listrik sendiri, baik berupa pembangkit listrik berbahan bakar diesel (PLTD) maupun berbahan bakar batubara (PLTU).

Penyediaan listrik di Kalimantan Barat harus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian bauksit di Kalimantan Barat mengingat industri pengolahan dan pemurnian bauksit membutuhkan energi listrik yang cukup besar terutama dalam proses kalsinasi. Rencana pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat terdapat pada tabel berikut.

Di samping terus melakukan pembangunan pembangkit, untuk menutupi kekurangan pasokan PT PLN juga akan membeli listrik dari pihak swasta melalui jaringan interkoneksi Kalimantan Barat-Serawak sesuai Surat Menteri ESD No. 4929/26/MEM.L/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Persetujuan Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara dan Interkoneksi Tenaga Listrik oleh PLN dan SESCO. Diharapkan, kekurangan pasokan dapat diatasi, meskipun belum mampu memenuhi kebutuhan untuk pabrik pengolahan bauksit.

Tabel Pembangunan dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2020

No	Pembangkit Listrik	Kapasitas (MW)	Lokasi	Tahun Mulai Pelaksanaan
1	PLTMH Merasap	500 kW	Kab Bengkayang	2014

2	PLTMH Sajingan	300 kW	Kab. Sambas	2014
3	PLTU Kalbar 2	2 x 55 MW	Kab. Bengkayang	2015
4	PLTU Kalbar 3 (Tanjung Gundul)	2 x 27,5 MW	Kab. Bengkayang	2016
5	PLTU Gambut Mempawah	3 x 67 MW	Kab. Mempawah	2017
6	PLTU Kalbar 1 (Parit Baru)	2 x 50 MW	Kota Pontianak	2015
7	PLTU Ketapang (Sukabangun)	2 x 10 MW	Kab. Ketapang	2014
8	PLTU Ketapang (Tembilok)	2 x 7 MW	Kab. Ketapang	2014
9	PLTU Kalbar 4 (Tayan)	2 x 100 MW	Kab. Sanggau	2018
10	PLTU Sanggau	2 x 7 MW	Kab. Sanggau	2013
11	PLTMH Maragun	121 kW	Kab. Sanggau	2014
12	PLTU Sintang	3 x 7 MW	Kab. Sekadau	2014
13	PLTMH Sinar Pekayau	209 kW	Kab. Sintang	2014
14	PLTA Nanga Pinoh	2 49 MW	Kab. Melawi	2019/2020
15	PLTGB Putussibau	8 MW	Kab. Kapuas Hulu	2015

Sumber : Bappeda Kalimantan Barat

Industri pengolahan dan pemurnian bauksit merupakan industri yang intensif energi sehingga membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Kebutuhan listrik yang besai ini belum dapat dipenuhi dari PLN. Hal ini dapat dilihat pada RUPTL 2011-2020 PLN dimana penambahan kapasitas pembangkit listrik sampai dengan tahun 2014 di wilayah Kalimantan Barat hanya sebesar 201 MW, dan diperkirakan hanya terpenuhi sekitar 17 persen atau 35 MW.

Potensi Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2013, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 berjumlah sekitar 4,64 juta jiwa, dimana sekitar 2,37 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2, 28 juta jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 146.807 km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat hanya 32 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 1,54 persen.

Menurut kelompok umur, penduduk Kalimantan Barat tahun 2009-2012 masih berbentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009-2012 masih didominasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri. Produktivitas total daerah diperlukan untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja, seberapa produktif tiap angkatan kerja

dalam perekonomian daerah per sektor dari 9 sektor dalam PDRB Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan harga konstan 2000.

Tabel Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (jiwa/Km2)
		Lk	Pr				
01	Sambas	252.474	260.097	515.571	0,94	6.394,70	81
02	Bengkayang	118.501	110.270	228.771	2,1	5.397,30	42
03	Landak	181.377	166.127	347.504	1,65	9.909,10	35
04	Pontianak	125.011	120.913	245.924	1,48	1.276,90	193
05	Sanggau	223.105	208.070	431.175	1,72	12.857,70	34
06	Ketapang	235.293	220.458	455.751	2,24	31.240,74	15
07	Sintang	198.324	186.368	384.692	1,69	21.635,00	18
08	Kapuas Hulu	119.924	119.212	236.136	2,08	29.842,00	8
09	Sekadau	98.415	91.663	190.048	1,27	5.444,30	35
10	Melawi	96.486	92.575	189.061	1,89	10.644,00	18
11	Kayong Utara	51.581	49.948	101.529	2,02	4.568,26	22
12	Kubu Raya	258.590	260.730	529.320	1,76	6.985,20	76
13	Kota Pontianak	293.016	294.153	587.169	1,88	107,80	5.447
14	Kota Singkawang	101.195	97.547	198.742	2,20	504,00	394
	Kalimantan Barat	2.366.29 2	2.275.10 1	4.641.39 3	1,74	146.807,0 0	32

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Tabel Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012 (Rp Juta)

No	Lapangan Pekerjaan	2008	2009	2010	2011	2012**
1	Pertanian	5,39	5,62	5,98	6,11	6,59
2	Pertambangan dan Penggalian	11,81	6,76	9,94	7,32	7,22
3	Industri pengolahan	57,98	65,65	50,28	58,42	69,13
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	32,29	58,94	45,61	30,87	34,64
5	Bangunan	27,29	29,53	24,78	28,73	27,87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,65	26,17	23,52	24,56	26,33
7	Pengangkutan dan komunikasi	32,7	38,42	50,27	60,35	77,12
8	Keuangan, real estate dan jasa perusahaan	114,48	110,6	93,89	84,96	75,31
9	Jasa-jasa	17,17	15,13	15,80	16,13	17,34
	Produktivitas Tenaga Kerja	13,56	13,94	14,45	14,95	16,15

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2008-2012), diolah, ** Angka Prediksi

Kinerja produktivitas tenaga kerja di Kalimantan Barat pada tahun 2008 sampai dengan 2012 atas dasar harga konstan 2000 berada pada kisaran Rp 13,56 juta – Rp 16, 15 juta. Ditinjau dari sembilan sektor produksi yang tertera dalam PDRB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008-2011 diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi pada sektor lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan, yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 114,48 juta dan pada tahun 2011 menjadi Rp 84,96 juta. Sementara itu, pada tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor yang dominan dengan nilai Rp 77,12 juta. Produktivitas tenaga kerja terendah berada pada sektor pertanian yaitu RTp 5,39-Rp 6, 11 juta (atas dasar harga konstan) dan di tahun 2012 diperkirakan menjadi Rp 6,59 juta.

Tabel IPM Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

No	Lokasi	Tahun					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011*	2012**	
01	Sambas	63,73	64,46	64,93	65,80	66,33	65,05
02	Bengkayang	66,81	67,18	67,55	67,98	68,53	67,61
03	Landak	66,74	67,21	67,55	68,16	68,71	67,67
04	Pontianak	67,90	68,41	68,75	69,07	69,63	68,75
05	Sanggau	67,86	68,19	68,55	68,97	69,53	68,62
06	Ketapang	66,84	67,41	67,89	69,63	69,19	67,99
07	Sintang	67,44	68,00	68,31	68,77	69,32	68,37
08	Kapuas Hulu	69,41	69,79	70,03	70,38	70,95	70,11
09	Sekadau	66,13	66,63	66,99	67,52	68,07	67,07
10	Melawi	67,91	68,45	68,67	69,01	69,57	68,72
11	Kayong Utara	64,69	65,07	65,38	65,75	66,29	71,44
12	Kubu Raya	66,31	66,77	67,56	68,06	68,62	67,46
71	Kota Pontianak	72,08	72,41	72,96	73,43	74,01	72,98
72	Kota Singkawang	68,02	68,47	68,86	69,21	69,77	68,87
	Kalimantan Barat	68,17	68,79	69,15	69,66	70,22	69,20
	Indonesia	71,17	71,76	72,27	72,77	n/a	n/a

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2008-2012 BPS RI, 2011 ** Angka sangat sementara

Tabel diatas menunjukkan angka capaian Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan tabel tersebut, IPM di Kalimantan Barat sejak tahun 2008 terus menunjukkan kenaikan, yaitu dari 68,17 menjadi 69,66 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 70,22. Capaian ini merupakan akumulasi dari IPM kabupaten/kota. Untuk tahun 2008 kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Sambas (63,73) dan

tertinggi Kota Pontianak (72,08), sedangkan pada tahun 2011 kabupaten terendah adalah kabupaten Kayong Utara (65,75) dan tertinggi di Kota Pontianak (73,43).

Kinerja penurunan angka kemiskinan Kalimantan Barat pada periode 2008-2012 menunjukkan hasil yang cukup signifikan yaitu dari 11,07 persen pada tahun 2008 menjadi 7,96 persen pada tahun 2012. Sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan perdesaan, yaitu 9,04 persen, dibandingkan dengan di kawasan perkotaan yang hanya 5,49 persen. Sebagai gambaran, kondisi angka kemiskinan di kabupaten/kota pada tahun 2011 tercatat bahwa angka kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Sanggau yaitu sebesar 4,67 persen dan tertinggi di Kabupaten Landak sebesar 13,13 persen.

Tabel Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	Angka Kemiskinan (%)					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011*	2012**	
01	Sambas	11,51	9,96	10,08	9,38	8,80	9,95
02	Bengkayang	9,41	7,82	7,80	7,25	6,81	7,82
03	Landak	19,65	15,48	14,06	13,13	12,32	14,73
04	Pontianak	7,81	5,46	6,41	5,97	5,60	6,25
05	Sanggau	6,25	4,62	5,02	4,67	4,38	4,99
06	Ketapang	15,21	13,08	13,67	12,75	11,97	13,34
07	Sintang	13,61	11,55	9,76	9,07	8,51	10,50
08	Kapuas Hulu	11,44	9,93	11,39	10,61	9,96	10,67
09	Sekadau	7,66	6,42	6,77	6,30	5,91	6,61
10	Melawi	14,80	12,62	13,77	12,93	12,14	13,25
11	Kayong Utara	14,50	12,43	11,69	10,91	10,24	11,95
12	Kubu Raya	0	6,78	7,14	6,67	6,26	5,37
13	Kota Pontianak	9,29	6,38	6,62	6,15	5,77	6,84
14	Kota Singkawang	7,89	6,20	6,12	5,69	5,34	6,25
	Kalimantan Barat	11,07	9,30	9,02	8,48	7,96	9,17
	Indonesia	15,42	14,20	13,30	12,36	n/a	n/a

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2008-2012 BPS RI, 2012 ** Angka sangat sementara (Bappeda)

Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2008-2012 juga menunjukkan penurunan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi kabupaten/kota juga pada umumnya demikian, dengan angka pengangguran tahun 2011 terbesar di Kota Pontianak yaitu 7,26 persen dan terendah di Kabupaten Kapuas Hulu yang mencatat angka 2,50 persen. Apabila dibandingkan tahun 2010 angka pengangguran yang menurun signifikan adalah Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang. Gambaran mengenai kondisi angka pengangguran di Kalimantan Barat adalah seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran (%)				
		2008	2009	2010	2011*	2012**
01	Sambas	3,89	6,09	4,53	2,99	3,11
02	Bengkayang	4,71	4,02	3,21	3,32	3,30
03	Landak	4,03	4,38	4,61	3,18	4,80
04	Pontianak	9,07	9,75	7,80	3,35	4,67
05	Sanggau	2,81	3,30	3,62	3,27	1,39
06	Ketapang	4,29	5,15	3,90	3,70	1,395
07	Sintang	3,59	3,12	2,35	3,38	2,05
08	Kapuas Hulu	2,27	1,67	2,25	2,50	1,58
09	Sekadau	2,74	3,14	2,31	2,93	0,60
10	Melawi	1,96	1,82	1,30	3,08	2,90
11	Kayong Utara	n/a	5,82	4,29	2,56	6,96
12	Kubu Raya	n/a	7,20	6,20	4,52	6,060
13	Kota Pontianak	10,21	9,38	7,79	7,26	5,35
14	Kota Singkawang	10,09	9,71	8,05	5,34	5,75
	Kalimantan Barat	5,41	5,44	4,62	3,88	3,48
	Indonesia	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2008-2012, BPS RI 2012

Potensi Sumberdaya Air Industri

Sumber air bersih bagi penduduk Kalimantan Barat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masak/minum dan mandi cuci yang diperoleh dari dua belas sumber air bersih. Pemanfaatan terbesar bersumber dari air hujan 39,11 persen, diikuti air sungai sebesar 18,49 persen. Adapun pemanfaatan air bersih terkecil bersumber dari air ledeng yaitu sebesar 0,40 persen. Berdasarkan laporan dari PDAM seluruh Kalimantan Barat, sampai dengan tahun 2010 jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 46.446.204 m³, naik sebesar 40,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya (33.087.245 m³), namun jumlah pelanggannya menurun dari 160.865 (tahun 2009) menjadi 143.032 (tahun 2010) atau turun sebesar 11,09 persen.

Tingkat pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat di kabupaten/kota masih belum optimal karena belum semua lapisan masyarakat bisa mengaksesnya. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2012 bahwa cakupan pelayanan air minum perpipaan di kabupaten/kota baru mencapai 49,74 persen (masih jauh di bawah target rencana MDGs yaitu 80%), disebabkan oleh luasnya jangkauan wilayah pelayanan serta terbatasnya kapasitas produksi sumber air bersih PDAM. Untuk itu, perlu segera dirumuskan kebijakan pelayanan air minum terutama pada daerah yang cakupan pelayanannya masih rendah.

Tabel Persentase Layanan Air Minum Perpipaan di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2008-2012

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
01	Sambas	60,40	63,42	64,05	64,96	65,34
02	Bengkayang	60,91	63,96	64,60	65,25	65,90
03	Landak	17,05	17,90	18,08	18,26	18,44
04	Pontianak	28,96	30,41	30,71	31,02	31,33
05	Sanggau	65,55	68,83	69,52	70,21	70,92
06	Ketapang	25,93	27,23	27,50	27,78	28,06
07	Sintang	40,87	42,91	43,34	43,77	44,21
08	Kapuas Hulu	67,29	70,65	71,36	72,07	72,79
09	Sekadau	71,30	74,87	75,62	76,37	77,14
10	Melawi	72,60	76,23	76,99	77,76	78,54
11	Kayong Utara	0	0	39,45	39,84	40,24
12	Kubu Raya	0	0	25,30	25,55	25,81
71	Kota Pontianak	60,86	63,90	64,54	65,18	65,84
72	Kota Singkawang	10,91	11,46	11,57	11,69	11,81
	Total	41,62	43,70	48,76	49,25	49,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Selain untuk perhubungan, sungai-sungai tersebut mempunyai potensi untuk digunakan sebagai sumber air industri. Sungai penting, terbanyak terdapat di Kabupaten Ketapang, demikian pula sungai yang mempunyai areal terluas juga terdapat di kabupaten tersebut, yaitu Sungai Pawan dengan luas sekitar 13.400 km².

Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang dapat dilayari sepanjang 942 km. Sungai-sungai besar lainnya antara lain Sungai Melawi (dapat dilayari 471 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Sekayam (221 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Ketungau (186 km), Sungai Landak (178 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Sekadau (117 km) dan lainnya.

Tabel Luas Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi	Daerah Aliran Sungai	Luas (km ²)
Kab Sambas	Paloh	770
	Sambas Besar	7.740

Lokasi	Daerah Aliran Sungai	Luas (km ²)
	Sebangkau	420
	Selakau	1.400
Kab Bengkayang	Sei Raya	420
	Duri	700
Kab Landak	Landak	8.650
Kab Pontianak	Mempawah	2.180
Kab Ketapang	Mendawak	2.950
	Lido	2.530
	Tolak	840
	Pawan	13.400
	Pasaguan Tapah	2.880
	Tenggar	280
	Kendawangan	3.380
	Simbar	630
	Air Hitam Kecil	980
	Air Hitam Besar	1.900
	Jelai	5.480
Kab Kayong Utara	Simpang	3.090
Kab Lainnya	Sungai lainnya	627
Kalimantan Barat		61.607

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Tabel Panjang Sungai dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilalui di Provinsi Kalimantan Barat

Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah yang Dilalui
Kapuas	1.086	Kab Sintang, Sanggau, Sekadau, Kubu Raya, Kota Pontianak, kab Pontianak, Kapuas Hulu
Melawi	471	Kab Sintang dan Kab Melawi
Sambas	233	Kab Sambas
Sekayam	221	Kab Sanggau
Pawan	197	Kab Ketapang
Ketungau	186	Kab Sintang
Landak	178	Kab Landak dan Kab Kubu Raya
Jelai	135	Kab Ketapang
Kendawangan	128	Kab Ketapang
Sekadau	117	Kab Sanggau
Belintang	>50	Kab Sanggau
Sepauk	>50	Kab Sintang
Silat	>50	Kab Kapuas Hulu
Bunut	>50	Kab Kapuas Hulu
Embaloh	58	Kab Kapuas Hulu
Mendawak	53	Kab Pontianak

Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah yang Dilalui
Batu Ampar	100	Kab Kubu Raya
Ambawang	52	Kab Kubu Raya
Punggur	73	Kab Kubu Raya
Kubu	38	Kab Kubu Raya

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 22 danau dengan luas berkisar antara 100 ha-117.500 ha yang berlokasi di empat kabupaten, yaitu di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan total luas sekitar 136.360 Ha. Danau terluas adalah Danau Sentarum (117.500 ha) yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jumlah danau terbanyak, yaitu 12 danau dengan total luas sebesar 132.975 ha atau sekitar 97,52 persen dari total luas danau di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel Danau dan Luas Danau di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Nama Danau	Luas (Ha)
Kubu Raya	Terentang	200
Sanggau	Selatai	300
	Bekat	1.000
	Lait	800
	Selengan	375
	Sekemtut	200
	Udang	200
	Meliput	100
	Pinang	100
	Semubung	100
	Kapuas Hulu	Sentarum
Luar I		5.400
Luar II		100
Pangembung		1.800
Seriyang		800
Sekawi		600
Bekuwan		1.500
Tunggal		300
Mongka		100
Ketutung		100
Belida I		4.400
Belida II		375

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014)

Profil Kawasan Peruntukan Industri

Kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang direncanakan memiliki Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan draft RTRW propinsi Kalimantan Barat 2014-2034, yaitu :

1. Kawasan peruntukan Industri Kabupaten Sambas
2. Kawasan Peruntukan Industri Kota Singkawang
3. Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Mempawah
4. Kabupaten sanggau
5. Kabupaten Landak
6. Kabupaten Sanggau
7. Kabupaten Kubu Raya
8. Kabupaten Ketapang
9. Kota Pontianak

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sambas

Dalam rangka program percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas telah dibuat rencana kawasan strategi Kota Sambas diantaranya adalah

1. Kawasan Strategi Nasional yang terdiri dari Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Malaysia dan KAPET Khatulistiwa
2. Kawasan Strategi propinsi yang terdiri dari Kawasan Industri Semparuk (KIS), Terminal khusus dan kawasan Industri (KI) Tanjung Api, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT/Agropolitan) Pemangkat, Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut

Tabel Luas areal Kawasan Industri Semparuk (KIS)

No	Peruntukan	Luas (ha)
1	General Industri areal	11,75
2	Export procesing zone	7,565
3	prasarana kawasan	3,55
4	public facilites	4,255
5	road and green area	8,51

Realisasi sampai saat ini belum ada pembangunan di Kawasan Industri Semparuk (KIS). Belum terealisasinya pembangunan di Kawasan tersebut adalah karena faktor:

1. Kawasan industri harus dikelola oleh satu perusahaan/badan pengelola, hingga saat ini KIS belum memiliki perusahaan/Badan Pengelola Kawasan Industri dan masih dikelola oleh BP KAPET Khatulistiwa
2. KIS belum memiliki izin Kawasan Industri (karena Badan Pengelola belum terbentuk)

3. Pasal 10 PP no 24 tahun 2009, persyaratan minimal KI adalah 50 ha, sedangkan areal KIS (yang telah dibebaskan) saat ini baru seluas 36 ha)dibebaskan melalui APBD Propinsi Kalimantan Barat seluas 30 ha, dan Pemerintah Kabupaten Sambas melalui APBD Kabupaten Sambas sekitar 6 ha
4. KIS merupakan aset bersama Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas karena penyediaan sarana dan prasarana di KIS menggunakan dana bantuan dari Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas tetapi belum ada dasar hukum/keepakatan yang mengatur pengelolaan aset di KIS antara Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas
5. Sumber dana yang terbatas serta sarana dan prasarana penunjang yang masih belum memadai (listrik, air bersih, telp dll)

Namun, informasi terakhir yang diperoleh adalah penambahan luas kawasan dan sudah mendapatkan izin prinsip dari Bupati Kabupaten Sambas seluas 20 ha

Fasilitas infrastruktur yang sudah ada dan terbangun adalah jalan menuju ke kawasan yang telah dibuat dan kondisinya masih belum ada pengerasan. Demikian pula, didekat lokasi kawasan Industri Semparuk terdapat pelabuhan yaitu pelabuhan Sintete KIS dengan fasilitas yang dimiliki adalah berupa :

1. Darmaga yang terbuat dari beton dengan ukuran (8 m x 70 m), darmaga kayu dengan ukuran (7 m x 25 m) dan (7 m x 20 m)
2. Tambatan yang terbuat dari kayu dengan ukuran (82 m² , 25 m² , dan 30 m²)
3. Gudang Sintete I (15 m x 30 m) dan gudang Sintete II (15 m x 24 m)

Dalam menunjang operasional kawasan ada beberapa rencana kebutuhan fasilitas dan infrastruktur antara lain :

No	Industri	Kebutuhan Listrik (kVA/ha)
1	Industri Pengolahan Makanan dan Minuman	305,19
2	Industri kimia/pengolahan CPO	305,19
3	Industri pengolahan karet	305,19
4	Industri pengolahan kayu dan furniture	305,19
5	Industri bahan bangunan	305,19
6	Fasilitas umum	592,17
7	Infrastruktur kawasan	18,54

Sehingga total estimasi kebutuhan air bersih untuk kawasan adalah 30,23 ltr/detik. Sumber air bersih dapat diperoleh dengan pembangunan waduk didalam kawasan dengan kapasitas 117.950 m³. Allternatif air baku yang dapat digunakan untuk mendukung KIS adalah sungai Sambas Besar, Sungai Sebangku, dan Sebedang. Penggunaan air baku dari sungai Sebangkau telah dibuat detail designnya.

Rencana pembangunan telekomunikasi yang akan mendukung KIS ada tiga alternatif yaitu :

1. Pembangunan sentral telepon digital di Semparuk
2. Establish STO system with Pemangkat or Singkawang Central,dan
3. Establish STO system where Pontianak as its Central dengan estimasi total kebutuhan adalah 3000 SST

Rencana tindak lanjut ke depan adalah :

4. Pemerintah daerah akan mempersiapkan ketentuan hukum terkait dengan kawasan Industri (PERDA)
5. Perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas dan BP KAPET Khatulistiwa dalam hal pengelolaan KIS yang dapat berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, atau badan Usaha Swasta
6. Perlu adanya aturan/dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan pemanfaatan aset daerah di KIS oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan bersama oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas

Kawasan Peruntukan Industri Kota Singkawang

Dalam draft RTRWK Kota Singkawang 2001-2034, Kota Singkawang direncanakan memiliki Kawasan Industri namun belum pasti. Kawasan yang ada saat ini adalah Kawasan industri peternakan unggas, sehingga pada saat survey dilakukan Kabupaten Singkawang belum memiliki Kawasan Industri atau pun Kawasan Peruntukan Industri. Industri yang berkembang di Kabupaten Singkawang hanya merupakan Industri yang tidak tersentra namun masih berupa spot-spot dan masih didominasi oleh industri kecil. Terkait dengan Kawasan Industri Peternakan, terdapat dua Industri besar yaitu industri pupuk (PT. Sinka Sinye Agrotama) dan industri pakan ternak (PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill).

Singkawang merupakan kota industri dan perdagangan terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Pontianak. Di Singkawang banyak dihasilkan komoditas industri antara lain industri pengolahan makanan,, bahan bangunan, furniture, keramik, anyaman dan home insutry. Komoditas industri yang cukup laku di pasaran adalah kerajinan keramik yang berlokasi di Sakkok, kecamatan Singkawang Selatan. Disektor perdagangan, Singkawang merupakan daerah yang menjadi salah satu jalur ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Pemasukan dan pengeluaran komoditas selalu dilakukan dalam kapasitas besar.

Industri-industri kecil di Kabupaten Singkawang masih merupakan industri rumahan yang pemasarannya masih untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Hanya beberapa industri seperti keramik yang pemasarannya sudah mencapai keluar daerah. Industri keramik sendiri belum dapat berkembang pesat karena minimnya minat generasi muda dalam menekuni kerajinan ini, industri yang ada sekarang ini adalah kebanyakan dari warisan orangtua mereka terdahulu. Mereka memproduksi juga masih berdasarkan pesanan karena keterbatasan modal.

Selain industri keramik ada beberapa industri makanan dan minuman. Untuk industri pengolahan makanan bahan bakunya sebagian besar masih mendatangkan dari luar daerah seperti tahu, tempe, kecap, kedelainya masih mendatangkan dari luar daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Singkawang luas tanam untuk tanaman kedelai hanya 2 hektar, yang tidak mencukupi kebutuhan industri. Industri pengolahan makanan lainnya seperti aneka keripik (kerupik singkong, pisang, sukun) yang bahan bakunya juga masih mendatangkan dari luar daerah. Namun, untuk industri keripik ini pemasarannya sudah sampai Malaysia dengan memasarkan sendiri setiap minggu sekali. Untuk industri pengolahan kelapa dalam menjadi minyak goreng mereka sudah mengadakan kemitraan dengan beberapa petani disekitarnya, namun kendalanya terkadang mereka lebih tertarik untuk membuat kopra. Harga kelapa yang kecenderungan naik dan harga kemasan yang tinggi mengakibatkan industri pembuatan minyak kelapa ini sempat terhenti.

Kota Singkawang memiliki potensi sektor perdagangan yang cukup potensial untuk dikembangkan, antara lain zircon dan kaolin yang merupakan bahan baku pembuatan keramik saok. Selain itu, ditemukan adanya bahan tambang bauksit yang saat ini masih dalam penyelidikan kandungan depositnya

Tabel Potensi Sektor Pertambangan yang Sudah Dieksplorasi di Kota Singkawang

No	Jenis Tambang	Produksi (ha)	Bidang usaha	Lokasi
1	Zircon	3.700	eksplorasi	Kec. Singkawang Timur, Singkawang Selatan
2	Kaolin	260	eksplorasi	Singkawang Selatan
3	Tanah, Batu, Pasir (Galian C)	130	eksplorasi	Singkawang Timur

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sanggau

Berdasarkan draft RTRW Kabupaten Sanggau 2011-2031, Kawasan Peruntukan Industri dikelompokkan menjadi dua, yaitu

1. Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Besar ; Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Entikong, Tayan Hulu, Toba, Mukok, Parindu, Kembayan, Sekayam, Noyan, dan Meliau
2. Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Rumahtangga adalah tersebar di seluruh kecamatan

Diantara Kawasan Peruntukan Industri skala menengah dan besar, Kawasan Industri dikembangkan pada lahan seluas ±225 hektar didusun Pebaok, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir. Status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk di dalamnya lahan hak guna bangunan PTPN XIII seluas 103,56 ha yang telah bersertifikat. Kawasan ini diberi nama Kawasan Industri Tayan (KIT) yang ditetapkan berdasarkan :

1. Koridor Ekonomi Kalimantan pada program MP3EI sebagai Simpul Industri Kelapa Sawit
2. RTRW Propinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2032 telah menetapkan Kawasan Industri Tayan sebagai salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
3. RTRW Kabupaten Sanggau tahun 2011-20031 telah menetapkan Kecamatan Tayan Hilir sebagai Kawasan Strategi untuk Kawasan Industri
4. Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor 405 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Propinsi Kalimantan Barat di kecamatan Tayan Hilir
5. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII tentang Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Propinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau

Sebagi lokasi Kawasan Industri Kecamatan Tayan Hilir terletak pada aliran Sungai Kapuas sebagai sarana transportasi termurah. Lebar Sungai Kapuas 1.100 meter (1,1 km) dengan kedalaman bervariasi antara 6 hingga 12 meter. Dengan menggunakan transportasi sungai jarak dari kecamatan Tayan Hilir-Pelabuhan Teluk Batang (yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor) adalah sekitar 80 km dari Kecamatan Tayan Hilir Pelabuhan Dwikora, Pontianak sekitar 90 km, Kecamatan Tayan Hilir terlerak pada ruas jalan poros/lintas Selatan Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Tersedia jaringan jalan aspal yang menghubungkan lokasi rencana

pembangunan Kluster Industri Hilir Kelapa Sawit dengan beberapa pabrik pengolahan minyak sawit, dengan jarak ke PPLB Entikong ±165 km dan kota Pontianak ± 112 km.

Tersedia energi listrik yang sangat besar, yang bersumber dari PLN, PLTU dengan daya 2 x 25 MW, PLTGGB dengan daya 6 MW, pembangkit listrik PT. ICA dengan daya 35 MW, PLTU Sejutang dengan daya 2 x 50 MW dan pembangkit listrik PTPN XIII dengan daya 6 MW. Disamping itu pada umumnya seluruh wilayah di Kecamatan Tayan Hilir dapat akses dengan telepon seluler dan memiliki PDAM, air sungai dan air tanah dengan kualitas air tergolong baik. Terdapat dermaga CPO PTPN XIII yang dapat menampung bersandarnya 6 unit kapal pengangkut CPO secara sekaligus, dengan kapasitas 5000 ton/kapal, dan berada di Kecamatan Meliau yang terletak di hulu kecamatan Tayan Hilir. Potensi transportasi juga didukung oleh pembangunan Jembatan Tayan akan menghubungkan Propinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah, yang akan menjadi salah satu lintas utama perekonomian di Kalimantan. Bertindak sebagai pengelola kawasan, telah ditetapkan kelembagaan Kawasan Industri Tayan merupakan salah satu unit usaha dari BUMD Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengelola aset pemerintah di wilayah Kawasan Industri Tayan dan sekitarnya. Masterplan kawasan telah dibuat dan belum memiliki Dokumen AMDAL.

Disamping peruntukan untuk industri hilir CPO, wilayah Tayan merupakan Kawasan Industri Pertambangan. Agar mulai dapat beroperasi komersial di tahun ini, PT. Antam tengah membangun pabrik pengolahan bauksit SmelterGrade Alumina (SGA) dan Chemical Grade Alumina (CGA), masing-masing berkapasitas 300 ribu ton alumina per tahun (CGA) dan 720 ribu ton alumina per tahun (SGA), dengan total kebutuhan bahan baku bauksit paling sedikit 3,42 juta ton per tahun. Dengan sumberdaya bauksit milik PT. Antam yang di Tayan Sanggau sebanyak 188,30 juta ton, dan dengan asumsi tingkat produksi tetap, maka umur tambang perusahaan ini sekitar 55,06 tahun. Artinya dalam 55 tahun ke depan keberlangsungan kegiatan produksi pabrik smelter alumina milik PT. Antam akan tetap terjamin.

Pembangunan pabrik Chemical Grade Aluminium (CGA) di Tayan, Kalimantan Barat terlaksana atas kerjasama antar PT Antam (80%) dengan Sowa Deko K K Jepang (20%) yang menelan biaya sekitar US\$ 450 juta. Proyek pembangunan CGA Tayan rencananya akan berjalan selama 32 bulan atau hingga akhir tahun 2013 dan mulai beroperasi komersial pada awal 2014. Dengan keberadaan CGA Tayan, Indonesia diharapkan tidak perlu lagi mengimpor alumina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Chemical Alumina (PT. ICA) merupakan joint venture PT. Antam, Show Denko dan Marubeni Corp.

Selain proyek CGA di Tayan, PT. Antam telah menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Hangzhou Jinjiang Group (HJG) dari China untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) di Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi Pabrik SGA memiliki kapasitas 1.000.000 metrik ton alumina per tahun, dengan mengolah 4.000.000 metrik ton bijih bauksit. Rencananya operasi komersial perdana akan dilakukan pada tahun 2014. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh HJG mengundurkan diri dan berpindah lokasi ke KI Ketapang. Berdasarkan data informasi kegiatan eksplorasi PT. Antam, PT. Antam terus melanjutkan kegiatan usaha tanpa patner dan data november 2014 menunjukkan bahwa telah ada hasil produksi dari eksplorasi PT. Antam di Mempawah. Pabrik SGA dengan nilai proyek US\$ 1 miliar ini, nantinya akan menghasilkan bahan baku aluminium yang dapat dipakai memenuhi kebutuhan domestik, misalnya untuk pabrik pengolahan aluminium PT. Inalum.

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Landak

Lokasi Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten Landak berada di Kecamatan Mandor. Sesuai dengan RJPMD Kabupaten Landak tujuan perencanaan dan pembangunan kawasan industri Mandor (Industrial Estate Mandor) adalah untuk:

1. Menyediakan Kawasan Industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tersedia untuk bangunan pabrik
2. Penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan-jalan raya, air, telekomunikasi, listrik dan juga fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya
3. Pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan
4. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastrukural dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu
5. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri melalui hadirnya Kawasan Industri
6. Meningkatkan optimasi tataruang wilayah

Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Industri untuk pengembangan industri hilir karet. Kawasan Industri Mandor merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kawasan industri di Kabupaten Landak, rencana pengembangan kawasan seluas 400 ha yang terbagi

menjadi 2 blok, yaitu blok timur dan blok barat, masing-masing seluas 200 ha. Namun, berdasarkan SK Bupati No. 530/18E/HK-2011 tentang penetapan kawasan KIM tanggal 18 Februari 2011 luas lahan KIM adalah 352,64 ha. Rencana tahap pertama pembangunan kawasan ini adalah pembangunan sarana pendukung seperti pos polisi, pos pemadam kebakaran, mess karyawan, poliklinik, power plan, dan instalasi air bersih. Tahap kedua rencananya untuk kavling-kavling industri. Tahapan industri ini dibagi menjadi empat zona, yaitu zona industri, zona fasilitas penunjang, zona infrastruktur kawasan, dan zona ruang terbuka hijau.

Untuk KIM tahap pertama, peruntukan zona industri karet merupakan kawasan utama seluas 11,66 ha, IKM 7,85 ha, Aneka Industri 44,13 ha, Industri sedang 11,58 ha, Industri besar 4,67 ha, dan sarana penunjang perumahan 2,03 ha serta sarana olahraga 1,7 ha.

Menurut keterangan dari pihak Bappeda kawasan ini pengelolanya adalah PT. Landak Barazaki. Kondisi kawasan saat ini baru berupa pembukaan lahan dan pengerasan jalan dari jalur utama menuju Kawasan Industri Mandor dan belum ada kegiatan industri apapun. Kawasan ini dialiri sungai kecil dan belum ada jembatan penghubung. Di sekitar kawasan ini terdapat kegiatan penambangan bauksit masyarakat, baik yang legal atau yang ilegal. Sebelumnya, sudah ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk mendaftarkan diri untuk masuk kawasan, namun karena pengembangan infrastruktur belum siap maka akhirnya mundur dengan teratur.

Rencananya kawasan ini diperuntukan untuk industri hilir komoditas karet, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pengembangan kawasan ini. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dalam merelisasikan pengembangan kawasan ini sangat diharapkan oleh pemerintah setempat.

Pengembangan jaringan listrik mengikuti pengembangan jaringan jalan dan menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Jaringan listrik di wilayah Kabupaten Landak terkoneksi dengan jaringan listrik dari Pontianak-Ngabang-Sintang-Sanggau, yang terhubung pada jaringan transmisi 150 KV disebut Sistem Khatulistiwa (Kepmen ESDM no 2682 tahun 2008 tentang rencana umum ketenagalistrikan). Berkaitan dengan ini, Gardu Induk terdapat di Kecamatan terdapat di Kecamatan Ngabang, Kecamatan Mandor, sementara gardu distribusi terdapat di Pahauman, Senakin, Darit, Mandor, dan Balai Karang.

Pengembangan jaringan telepon menumbuhkan mekanisme kegiatan yang menunjang pada meningkatnya ekonomi wilayah dan meningkatnya efektivitas serta efisiensi koordinat antar pemerintah maupun swasta dalam lingkup yang lebih luas. Seperti halnya jaringan listrik, jaringan telepon pelayanannya dilakukan tersendiri yaitu oleh PT. Telkom sehingga perencanaan sistem jaringan mengikuti arahan dan rencana PT. Telkom.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan jaringan telekomunikasi tetap diwilayah Kabupaten Landak, Kebutuhan satuan sambungan pada 20 tahun mendatang mencapai 48.569 SST untuk pelanggan domestik dan 12.142 SST untuk pelanggan non domestik. Sistem jaringan nirkabel memungkinkan untuk dikembangkan dengan sistem menara telekomunikasi secara bersama di wilayah Kecamatan Ngabang, Sengah Temila, Menyuke, Mempawah Hulu, Mandor, dan Air Besar.

Kabupaten Landak termasuk ke dalam DAS Landak yang merupakan sungai terbesar diWilayah Kabupaten Landak. Dalam proses pemanfaatan air baku harus diperhatikan keseimbangan daya dukung sumberdaya air, sebab keseimbangan daya dukung sumberdaya air berkaitan erat dengan masalah kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penggunaan sumberdaya air perlu diatur permukaan dan air baku. Air permukaan yang ada saat ini dipakai untuk konsumsi rumah tangga dan dipergunakan juga untuk irigasi persawahan dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Landak mencapai 2.023,71 liter/detik dengan kehilangan air 3373 liter/detik. Kebutuhan air bersih tersebut akan dapat dilayanin sepenuhnya oleh bersih (PDAM) dengan Kapasitas produksi 16.864,22 liter/detik. Kondisi saat ini pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Landak belum melayani semua kecamatan. Daerah pelayanannya baru melayani sekitar 10% saja dari jumlah penduduk di Kecamatan Ngabang.

Berkaitan dengan jaringan transportasi, rencana jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri berupa jalan yang menghubungkan

1. Ruas jalan Sungai Pinyuh –Sebadu
2. Ruas jalan Sebadu-Sidas
3. Ruas jalan Sidas-Ngabang-Sosok-Tanjung

Rencana jaringan jalan propinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer K-2 adalah

4. Ruas jalan Anjongan-Karangan
5. Ruas jalan Karanga-Simpang Tiga-Bengkayang
6. Ruas jalan Simpang Tiga-Sidas

7. Ruas jalan km 52 Pontianak-Landak (KIM)-Pal 20 Ngabang.

Jaringan jalan kolektor primer K-3 adalah

8. Ruas jalan Ledo-Serimbu-Kuala Behe-Ngabang

9. Ruas jalan Kuala Behe-Muara Ilai

Jaringan jalan kabupaten antara lain rencana jaringan jalan kabupaten meliputi jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan. Kawasan industri Mandor di dukung oleh jaringan jalan khusus angkutan produksi antara lain:

1. Ruas Menjilin-Sadaniang

2. Kawasan Industri Mandor-jalan 28 oktober Pontianak dan (Ngabang-Serimbu-KualaBehe)

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Ketapang

Berdasarkan draft RTRW Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Ketapang dikembangkan di seluruh Kecamatan. Industri yang dikembangkan dapat berupa industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga. Kawasan Industri yang dikembangkan di Kabupaten Ketapang seluas 1000 ha yang terbagi dari industri kecil sampai dengan industri besar yang terletak di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri di Propinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, kabupaten ini juga ditetapkan sebagai kawasan andalan darat dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri dan kawasan andalan laut adalah laut dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. Kabupaten ketapang juga merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kawasan pertambangan, kawasan industri, dan kawasan industri pertambangan. Di propinsi Kalimantan Barat penyebaran tambang mineral terluas terdapat di Kabupaten Ketapang dengan presentase 55,08% dengan perincian seluruh potensi penyebaran mineral, yaitu di Bengkayang (bauksit), Ketapang (mineral dan radio aktif), Singkawang (bauksit), Landak (emas dan bauksit), Sambas (emas dan bauksit), Kapuas Hulu (emas), Kayong Utara (timah), Sintang (emas), Kubu Raya (bauksit dan mineral logam), Melawi (radio aktif dan zircon), Pontianak (emas), Sangau (bauksit), dan Sekadau (emas).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Ketapang, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Ketapang meliputi:

1. PKW (pusat kegiatan wilayah) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten yaitu Kota Ketapang
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yaitu Kota Balai Berkuak, Sandai, Tumbang Titi, Manismata, dan Kendawangan
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yaitu Simpang Dua, Aur Kubing, Menyumbang, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu, Riam, Marau, Air Upas, Sukaraja, pesaguan, Sei Awan Kiri, dan Kuala Tolak
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang merupakan pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa, yaitu Pangkalan Teluk, Sungai Kelik, Betenung Tanjungpura, Pelang, Riam Danau, Tanjung, Serengkah, Nanga Kelampai, Sukaramai, Terusan, Air Hitam Besar, Sepotong, Semandung Hulu, Meraban, dan Cinta Manis

Lokasi kawasan Peruntukan Industri Kabupaten ketapang memiliki potensi dukungan transportasi berupa :

1. Pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Ketapang dan Kandawangan
2. Pelabuhan Nasional Pontianak (210 km) dimana lokasi strategis Pelabuhan Pontianak menjadi Kawasan sebagai "essential capital" akses logistik ke pasar dunia
3. Jaringan jalan aspal (jalan propinsi/kolektor) yang menghubungkan lokasi rencana pembangunan Kawasan Industri Ketapang

Industri yang dikembangkan pada wilayah ini adalah untuk pengembangan Kawasan Industri Bauksit. Luas kawasan Peruntukan Industri adalah 3.716 ha, dimana Kawasan Industri yang dikelola oleh PT. Ketapang Bangun Sarana (KBS) memiliki informasi lahan seluas 1.376 ha berdasarkan Surat Bupati Ketapang no. 664.1?2238?DPU-E tanggal 10 Desember 2012 tentang peta informasi lahan untuk Industri Pabrik Alumina, Pabrik CPO dan industri pendukung lainnya dengan ijin lokasi berdasarkan Surat Bupati Ketapang No. 248/PEM/2013 tentang pemberian ijin Kawasan Industri PT. Ketapang Bangun sarana seluas 1000 ha. Pada perusahaan lain yaitu PT Borneo Alumindo Prima memiliki informasi lahan seluas 2.340 ha berdasarkan Surat Bupati Ketapang No. 664.1.36/DPU-E tanggal 8 Januari 2013 peta informasi lahan untuk industri pabrik alumina serta pelabuhan khusus untuk sendiri PT. Borneo Alumindo Prima dan ijin lokasi berdasarkan Surat Bupati Ketapang no. 249/PEM/2013 tentang ijin pemberian lokasi kepada PT. Borneo Aluindo Prima seluas 1.150 ha. Seluruh lokasi berada di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hiir Selatan, Kabupaten Ketapang.

PT. Borneo Alumindo Prima dan PT. Ketapang Bangun Sarana (Hangzhou Jinjiang Group) melakukan investasi smelter dengan investasi 4,5 miliar dolar AS. Smelter akan menghasilkan aluminium oksida sebanyak 4,5 juta ton. Disamping di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir, juga terdapat investasi pengolahan bauksit lainnya yaitu PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery di Desa Mekar Utama, kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan Investasi US\$ 968,4 juta dolar dengan luas 1.607 ha. Selain itu, pada wilayah sekitar Kecamatan Matan Hilir dilaksanakan pembangunan Food Estate Ketapang ditargetkan menjangkau 100 ribu hektar dengan dana 5 triliun dan diharapkan bisa menyumbang 1,5 juta ton padi per tahun. Pembangunan food estate Ketapang dikoordinir oleh PT. Sang Hyang Seri (BUMN pertanian) yang didukung oleh 12 BUMN lainnya yang tergabung dalam sinergi BUMN Peduli. Kedua belas BUMN tersebut diberi tugas masing-masing sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Disamping padi, juga sedang dilakukan pengembangan kawasan perkebunan tebu dan rencana pengembangan industri kelapa sawit.

Kawasan Industri Ketapang (KIK) dengan pengelola PT Ketapang Bangun Sarana berada di tepi jalan propinsi dan hanya berjarak 100 m dari Laut Jawa , sehingga di kawasan tersebut berpotensi untuk dikembangkan pelabuhan bongkar muat barang, sarana listrik bersumber dari rencana pengembangan PLTU Ketapang dengan kapasitas 2 x 6 MW pada tahun 2016 dan pembangunan power plant pada KI Ketapang (3 X 10 MW). Yang tergolong baik. Saat ini dari segi informasi dan telekomunikasi KI Ketapang dapat diakses dengan telepon seluler dan pengembangan jalur telepon tetap PT. Telkom.

Kawasan Peruntukan Industri Kota Pontianak

Berdasarkan draft RTRW Propinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan Pontianak, yang meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata. Kegiatan sektor industri yang akan dikembangkan di Kota Pontianak adalah industri pengolahan dan perakitan dengan skala industri yang bervariasi, baik industri besar, menengah, kecil maupun industri rumah tangga (home industri) yang mengolah sumber alam hasil pertanian dan perkebunan serta berbagai bentuk industri perakitan. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan jalur transportasi regional yang akan berkembang dengan pesat di masa-masa mendatang serta posisi wilayah perkotaan yang dilalui oleh sungai Kapuas sebagai jalur penghubung dengan wilayah luar Kalimantan baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga keberadaan industri ini penting untuk mengubah kawasan-kawasan yang kurang produktif menjadi fungsi kegiatan yang produktif. Kegiatan yang ada diperkirakan akan terus

berkembang menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja baik penduduk kota maupun masyarakat sekitarnya

Penggunaan lahan industri di Kota Pontianak diarahkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan, rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan draft RTRW Kota (Pontianak 2013-2033 luas Kawasan Peruntukan Industri (untuk industri kecil dan rumah tangga) lebih kurang 258 ha dikembangkan :

1. Di Kecamatan Pontianak Utara meliputi Kelurahan Batu Layang, Siantan Hilir, dan Siantan Hulu
2. Di Kecamatan Pontianak Timur meliputi kelurahan Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu
3. Di kecamatan Pontianak Barat di Kelurahan Sungai Beliang
4. Di Kecamatan Pontianak Tenggara di Kelurahan Bangka Belitung laut

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Pontianak berupa sektor industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan, sehingga industri polutif dianjurkan keluar dari wilayah Kota Pontianak. Hal ini juga sesuai dengan visi misi Kota Pontianak yang menuju kota jasa. Hal ini juga dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Pontianak yang sudah tidak memungkinkan dikembangkannya industri besar khususnya yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang banyak menggunakan air, berpolusi udara tinggi, menimbulkan kebisingan dan lain-lain.